

**Jalan Kenari No 56 Komplek Balaikota Timoho**

**Yogyakarta**

# **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemeritah Kota Yogyakarta Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua dalam masa RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022.

Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemeritah Kota Yogyakarta disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemeritah Kota Yogyakarta Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemeritah Kota Yogyakarta. Komitmen dalam Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemeritah Kota Yogyakarta, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemeritah Kota Yogyakarta untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil pembangunan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang seoptimal mungkin sesuai potensi dan sumber daya yang ada dalam melaksanakan kegiatan

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang yang diharapkan bisa terwujud. Berkenaan dengan itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemeritah Kota Yogyakarta ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

Ttd.

Ir. Hari Setyowacono, MT

NIP. 19640126 199303 1 005

## **DAFTAR ISI**

### SAMPUL DEPAN ………………………………………………. 1

1. KATA PENGANTAR ………………………………………………. 2

### DAFTAR ISI ………………………………………………………. 3

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang ……………………………………….. 4
  2. Maksud dan Tujuan …………………………………. . 4
  3. Ringkasan Organisasi ………………………………. 5

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

* 1. Rencana Strategis (Renstra) ……...…………………..... 11

a. Visi dan misi ………………………………………… 11

b. Tujuan ……………………………………………….. 11

c. Sasaran Strategis .………………………………...... 11

d. Kebijakan ….............................…………………...... 12

e. Program untuk Pencapaian Sasaran ………………...... 12

f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ……………………..... 16

g. Strategi ....................................................……............ 20

h. Sistem Pelaporan dan koordinasi ........…...................... 20

* 1. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 .………………….... 23
  2. Anggaran Tahun 2018 ………………………………….. 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

* 1. Capaian Kinerja Organisasi ................……………………. 28
  2. Realisasi Anggaran ……………………………………… 40

BAB IV PENUTUP ………………………………………………....... 44

Lampiran :

1. Lampiran Review Renstra
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
3. Perjanjian Kinerja (PK)
4. Pengukuran Kinerja
5. Rencana Aksi
6. Evaluasi Renja

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

Proses penyusunan Laporan Pemerintah dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

#### **Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKJ juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kota Yogyakarta merupakan instansi yang melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam bidang pertanahan dan tata ruang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Dalam rangka untuk menunjang visi pembangunan kota Yogyakarta 2017-2022 Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu ”***Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelajayan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”,*** Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kota Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta telah menyusun Program dan Kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsi pokok Dinas dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Program Kegiatan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018, yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 serta diuraikan dalam Surat Keputusan Kepala DPDPK Kota Yogyakarta Nomor 20/DPPA-SKPD/X/2018 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018. Sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan tersebut disampaikan laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.

#### **Ringkasan Organsasi**

#### **Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi**

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta., sebagai Pedoman Tugas adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

Susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, terdiri dari :

* + - * 1. Kepala Dinas
        2. Sekretariat, terdiri dari :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

* + - * 1. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
      1. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
      2. Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
      3. Seksi Sengketa Tanah.
         1. Bidang Pembinaan dan Pengaturan Tata Ruang, terdiri dari :

1. Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;
2. Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan;
3. Seksi Pembinaan Tata Ruang.
   * + - 1. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang, terdiri dari :
4. Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan;
5. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang;
6. Seksi Data dan Informasi.
   * + - 1. Unit Pelaksana Teknis
         2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas seperti yang terdapat dalam lampiran sebagai berikut :

**Sekretaris**

Seksi Pelaksanaan & Pengawasan Tata Ruang

**Kepala Dinas**

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan

Seksi Administrasi & Pengendalian Pertanahan

Seksi Pengaturan Tata Bangunan & Tata Lingkungan

Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah & Tata Ruang Rinci

Seksi Pemanfaatan Pertanahan

Seksi Inventarisasi & Identifikasi Pertanahan

**Bidang Pertanahan**

**Bidang Pengaturan & Pembinaan Tata Ruang**

**Bidang Pelaksanaan & Pengawasan Tata Ruang**

Jabatan Fungsional

Seksi Data & Informasi

Subag. Umum & Kepegawaian

Seksi Sengketa Tanah

Seksi Pembinaan Tata Ruang

Subag. Umum & Kepegawaian

Seksi Data & Informasi

Jabatan Fungsional

**Bidang Pelaksanaan & Pengawasan Tata Ruang**

**Bidang Pengaturan & Pembinaan Tata Ruang**

**Bidang Pertanahan**

Seksi Inventarisasi & Identifikasi Pertanahan

Seksi Pemanfaatan Pertanahan

Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah & Tata Ruang Rinci

Seksi Pengaturan Tata Bangunan & Tata Lingkungan

Seksi Administrasi & Pengendalian Pertanahan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan

**Kepala Dinas**

Seksi Pelaksanaan & Pengawasan Tata Ruang

**Sekretaris**

Seksi Sengketa Tanah

Seksi Pembinaan Tata Ruang

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanahan dan tata ruang

Adapun fungsi dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah :

Perumusan kebijakan teknis urusan pertanahan dan tata ruang

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanahan dan tata ruang;

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang pertanahan dan tata ruang;

pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanahan dan tata ruang;

pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;

pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan dibidang pertanahan dan tata ruang.

#### **Sumber Daya Manusia**

Personil Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta di dukung oleh 36 orang karyawan yang terdiri dari : PNS 33 orang dan Tenaga Bantu (Naban) 3 orang.

Dari jumlah personil tersebut saat ini ada 1 (satu) orang yang sedang melaksanakan tugas belajar S2 (Pasca Sarjana) di Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

**Jumlah Pegawai Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:**

### S2 : 11 orang ( 31,43 % )

S1 : 12 orang ( 34,29 % )

D III : 2 orang ( 5,71 % )

SMA/K : 7 orang ( 20,00 % )

Naban : SMA: 2 orang, S1 : 1 orang

**Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menurut Pangkat/golongan adalah sebagai berikut :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepala Dinas | Pembina Utama Muda/ Gol.IVc | : | 1 | Orang |
| Kepala Bidang/Sekretariat | Pembina Tingkat I / Gol. IVb | : | 1 | Orang |
|  | Pembina / Gol. IVa | : | 2 | Orang |
|  | Penata Tingkat 1/ Gol. IIId | : | 1 | Orang |
| Kepal Seksi | Pembina / Gol. IVa | : | 3 | Orang |
|  | Penata Tingkat I / Gol. III d | : | 3 | Orang |
|  | Penata / Gol. III c | : | 3 | Orang |
| Kepala Sub. Bag | Penata / Gol. III c | : | 2 | Orang |
| Staf | Penata Tingkat I / Gol. III d | : | 1 | Orang |
|  | Penata / Gol. III c | : | 3 | Orang |
|  | Penata Muda Tk.I/III b | : | 6 | Orang |
|  | Penata Muda/III a | : | 2 | Orang |
|  | Pengatur Tk. I/II d | : | 1 | Orang |
|  | Pengatur / Gol. IIc | : | 3 | Orang |
|  | Naban | : | 3 | Orang |

**Tabel 1.** Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menurut Jenis Kelamin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Status Kepagawaian | Jenis Kelamin | |
| Laki- laki | Perempuan |
| 1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 18 | 14 |
| 2 | Tenaga Bantu (Naban) | 3 |  |
|  | JUMLAH | 21 | 14 |

**Tabel 2.** Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menurut Masa Kerja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Masa Kerja | Jumlah | |
| (Orang) | |
| 1 | 1 – 10 tahun | 6 |
| 2 | 11 – 20 tahun | 17 |
| 3 | 21 – 30 tahun | 10 |
| 4 | > 31 tahun | 2 |
|  | JUMLAH | 35 |

Dengan adanya beberapa pegawai yang telah memasuki masa pensiun dan mutasi pegawai ke SKPD lain maka dalam rangka untuk menunjang peningkatan kinerja perlu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengisian formasi sesuai kebutuhan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

#### **Sarana dan Prasarana Kerja**

Sarana dan prasarana sebagai pendukung kelancaran tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta relatif mencukupi meskipun masih diperlukanpenambahan/perbaikan.

Secara garis besar sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis** | **Jumlah** |
| 1. | Kendaraan roda empat | 5 unit |
| 2. | Kendaraan roda dua | 12 unit |
| 3. | Sepeda | 2 unit |
| 4. | Roll meter | 4 unit |
| 5. | Mesin ketik | 6 unit |
| 6. | Kalkulator | 6 unit |
| 7. | Almari | 17 unit |
| 8. | Rak arsip besi | 20 unit |
| 9. | Rak arsip kayu | 14 unit |
| 10. | Filling cabinet | 15 unit |
| 11. | Brand kas | 3 unit |
| 12. | Cash box | 1 unit |
| 13. | Almari lerek | 12 unit |
| 14. | Papan board dinding | 10 unit |
| 15. | Presensi sidik jari | 2 unit |
| 16. | Wireless Hotspot | 1 unit |
| 17. | Almari arsip kayu | 14 unit |
| 18. | Kursi tamu /zice | 4 unit |
| 19. | Meja rapat | 36 unit |
| 20. | Meja telepon | 8 unit |
| 21. | Meja knap | 3 unit |
| 22. | Kursi rapat | 34 unit |
| 23. | Kursi putar | 23 unit |
| 24. | Kursi kerja | 49 unit |
| 25. | Kursi lipat | 124 unit |
| 26. | Meja komputer | 6 unit |
| 27. | Meja kerja ½ biro | 18 unit |
| 28. | Meja Counter | 1 unit |
| 29. | Jam dinding | 12 unit |
| 30. | AC | 16 unit |
| 31. | Vacum cleaner | 1 unit |
| 32. | Kipas Angin | 11 unit |
| 33. | Tape Recorder | 2 unit |
| 34. | Wireless | 3 unit |
| 35. | UPS | 32 unit |
| 36. | Stabiliser | 1 unit |
| 37. | Dispenser | 4 unit |
| 38. | Komputer | 30 unit |
| 39. | Note book | 16 unit |
| 40. | Printer | 38 unit |
| 41. | Harddisk Eksternal | 2 unit |
| 42. | Scanner | 1 unit |
| 43. | LCD Proyektor | 7 unit |
| 44. | Handycam | 1 unit |
| 45. | Meja kerja biro | 17 unit |
| 46. | Kamera digital | 4 unit |
| 47. | Digital Voice Recorder | 1 unit |
| 48. | LED TV 32” | 8 unit |
| 49. | Telepon langsung | 1 unit |
| 50. | Telepon internal | 10 unit |
| 51. | Meja Kubical | 26 unit |
| 52. | Almari Es | 1 unit |
| 53. | HT | 2 unit |
| 54. | Faximale | 1 unit |
| 55. | Gedung | 1 unit |
| 56. | Gudang | 1 unit |
| 57. | Pompa Air | 1 unit |
| 58. | Jet Cliner | 1 unit |
| 59. | Meteran ukur | 2 unit |
| 60. | Meteran digital | 4 unit |
| 61. | Sketmat digital | 2 unit |
| 62. | Kardek besi | 1 unit |
| 63. | Papan nama instansi | 1 unit |
| 64. | Backdrop Papan Nama Instansi | 1 unit |
| 65. | Almari display kaca | 2 unit |
| 66. | White board | 6 unit |
| 67. | OHP | 1 unit |
| 68. | Almari Kaca | 7 unit |
| 69. | Meja Bengkok | 1 unit |
| 70. | Air Purifier | 5 unit |
| 71. | Kompor gas | 1 unit |
| 72. | Tabung gas | 1 unit |
| 73. | Tempat sampah kayu | 3 unit |
| 74. | Karpet | 1 unit |
| 75. | Layar Proyektor | 1 unit |
| 76. | Hardisk Eksternal | 2 unit |
| 77. | Kursi hadap | 4 unit |
| 78. | Radio tape kompo | 1 unit |
| 79. | Kamera video digital | 2 unit |
| 80. | Buku | 125 unit |

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

* 1. **Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta untuk periode 6 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program SKPD, Renstra berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional.

* + 1. **Visi dan Misi**

**Visi :**

*“Tertib Pertanahan dan Penataan Ruang yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan”*

**Misi :**

Dengan Visi seperti tersebut diatas maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mempunyai Misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan penataan ruang.
2. Menciptakan tertib administrasi dan Tertib Penggunaan Pertanahan.
   * 1. **Tujuan**

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 6 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi *Meningkatkan Penyelenggaraan penataan ruang***,** bertujuan untukMeningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.

Misi *Menciptakan tertib administrasi dan Tertib Penggunaan Pertanahan,* bertujuan untuk Meningkatkan Tertib administrasi pertanahan.

* + 1. **Sasaran Strategis**

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2018 adalah sebagaimana **Tabel 4**. sebagai berikut :

**Tabel 4**. Sasaran Strategis

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Target 2018 |
| 1. | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang | % | 55,83 |
| 2. | Tertib administrasi pertanahan meningkat. | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | % | 92,41 |

Adapun Sasaran Strategis Jangka Menengah yang hendak dicapai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam kurun waktu enam tahun adalah sebagaimana **Tabel 4.a** sebagai berikut :

**Tabel 4.a** Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR** | **TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE** | | | | | |
|  |  |  | **TUJUAN/ SASARAN** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Meningkatkan Kesesuaian penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang. | Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat. | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang. | 47,90 | 55,83 | 64,25 | 70,58 | 77,25 | 81,97 |
| 2 | Meningkatkan tertib administrasi pertanahan. | Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat. | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan. | 30,07 | 92,41 | 94,95 | 96,86 | 98,77 | 100 |

* + 1. **Kebijakan**

Arah kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk mencapai visi, misi, tujuan adalah :

* + - 1. Meningkatkan penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang.
      2. Meningkatkan penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang;
      3. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan
    1. **Program untuk Pencapaian Sasaran**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program-program prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut :

Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatdidukung oleh program :

* Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
* Pengendalian Tata Ruang

**Tabel 4b**. Program Pengaturan dan Program Pengendalian Tata Ruang

| **No** | **Program/Kegiatan** | **Tolok Ukur Program/Kegiatan** | **Target** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Murni** | **Perubahan** |
| **1** | **Program Pembinaan Tata Ruang** | | | |
| 1.1 | Kegiatan Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci | Naskah Akademik Revisi Perda RTRW | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
|  | Draft Album Peta Revisi Perda RTRW | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
|  | Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
|  | Draft Revisi Perda RTRW | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 1.2 | Kegiatan Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan | Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL) | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| Draft Perwal RTBL | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| Rancangan 3 Dimensi (Skyline) Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang. |  | 1 Dokumen |
| 1.3 | Kegiatan Pembinaan Tata Ruang | Laporan Telaah Penataan Ruang Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Sosialisasi Pembinaan Tata Ruang Kota Yogyakarta | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Kajian Study Model dan Bentuk Kompensasi terhadap Pemanfaatan Ruang di Kota Yk. | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Kajian Evaluasi dan Identifikasi Potensi Rumah Susun di Kota Yk | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Kajian Pengembangan Kawasan Tumbuh Cepat Ekonomi Jogja Barat. | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Kajian Pengembangan Kawasan Koridor Ipda Tut Harsono. |  | 1 Dokumen |
| **2** | **Program Pengendalian Tata Ruang** | | | |
| 2.1 | Kegiatan Pengendalian Tata Ruang | Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
|  | Laporan Koordinasi Penyelenggaran Penataan Ruang | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 2.2 | Kegiatan Pengawasan Tata Ruang | Laporan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakwas) | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penataan Ruang | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang. | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
|  |  | Neraca Penatagunaan Tanah | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
|  |  | Kajian Perangkat Pengendalian Penataan Ruang. | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 2.3 | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang | Kajian Databse Spasial Penataan Ruang | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
|  | Updating Peta Ruang Terbuka Hijau (RTH). | 1 Dokumen | 1 dokumen |

Sasaran **Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat** didukung oleh program :

Pengelolaan Pertanahan sebagaimana tabel 4.c sebagai berikut :

**Tabel 4c.** Program Pengelolaan Pertanahan

| **No** | **Program/Kegiatan** | | | **Tolok Ukur Program/Kegiatan** | **Target** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Murni** | **Perubahan** |
| **1** | **Program Pengelolaan Pertanahan** | | | | | |
| 1.1 | Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan. | | | Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta. | 25 bidang | 25 bidang |
|  |  |  |  | Pengurusan Peta Bidang Tanah | 15 bidang | 5 bidang |
|  |  |  |  | Pengurusan untuk Surat kekancingan | 15 bidang | 15 bidang |
|  |  |  |  | Pelacakan dan Identifikasi tanah Negara/Pemkot sepanjang pinggiran sungai | 3 kelurahan | 3 kelurahan |
|  |  |  |  | Inventarisasi data pertanahan se Kota Yk yang belum jelas alas haknya baik tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Pemkot. | 9 kelurahan | 9 kelurahan |
|  |  |  |  | Digitalisasi dokumen-dokumen viital pertanahan. | 1 dokumen | 1 dokumen |
|  |  | | | Database Sistem Inventarisasi Pertanahan. | 1 dokumen | 1 dokumen |
| 1.2 | Kegiatan Pemanfaatan Pertanahan | | | Pengadaan Tanah pembangunan Kantor Kelurahan | 1 Kelurahan | 11 lokasi |
| pengadaan tanah untuk RTHP | 4 lokasi | 9 lokasi |
| Pengadaan tanah untuk Balai Serbaguna dan jalan | 2 lokasi | 6 lokasi |
| Penyelesaian Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara. | 60 permohonan | 60 permohonan |
| 1.3 | Kegiatan Penyelesaian Masalah Pertanahan | | | Penyelesaian Masalah Pertanahan | 1 dokumen | 1 dokumen |
| Pencegahan timbulnya masalah pertanahan. | 1 dokumen | 1 dokumen |

Untuk mendukung terselenggaranya peningkatan pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan pelaporan, akan didukung progran internal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagaimana adalah tabel 4d sebagai berikut:

**Tabel 4d.** Program Internal

| **No** | **Program/Kegiatan** | **Tolok Ukur Program/Kegiatan** | **Target** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Murni** | **Perubahan** |
| **1** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | |
| 1.1 | Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi. | Makan Minum Pegawai | 41 orang | 41 orang |
| Makan Minum Koordinasi | 132 kali | 132 kali |
| Makan Minum Tamu | 180 orang | 150 orang |
| Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah | 15 laporan | 15 laporan |
| 1.2 | Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Meterai 3000 yang tersedia | 300 buah | 300 buah |
| Meterai 6000 yang tersedia | 300 buah | 300 buah |
| Jasa Pengiriman/Paket | 17 kali | 4 kali |
| STNK Roda 2 yang terbayar | 15 unit | 12 unit |
| STNK Roda 4 yang terbayar | 5 unit | 5 unit |
| KIR Kendaraan Roda 4 | 1 unit | 1 unit |
| Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 12 jenis | 12 jenis |
| Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | 12 bulan |
| Alat tulis kantor yang tersedia | 69 jenis | 47 jenis |
| Jasa Penggandaan | 170000 lembar | 79.725 lembar |
| Komponen Instalasi Listrik/penerangan | 8 jenis | 8 jenis |
| Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia | 2 jenis | 2 jenis |
| Peraturan Perundang-undangan yang tersedia | 1 jenis | 1 jenis |
| Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | 5 jenis | 5 jenis |
| Jasa Pemeliharaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor | 24 jenis | 24 jenis |
| 1.3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran. | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi yang tersusun. | 4 Jenis | 4 jenis |
| Dokumen Administrasi kepegawaian yang terkelola | 38 Dok ASN | 38 Dok ASN |
| Jasa Tenaga Bantuaan | 3 orang | 3 orang |
| **2** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | |
| 2.1 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan kantor/tempat | 1 jenis | 1 jenis |
| 2.2 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2. | 12 unit | 12 unit |
|  | Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 | 5 unit | 5 unit |
| **3** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.** | | | |
| 3.1 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD. | Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA dan DPA). | 5 dokumen | 5 dokumen |
|  | Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil). | 5 dokumen | 5 dokumen |

Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima kepada masyarakat dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

Pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas.

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan, menengah dan tinggi yang merata serta berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat.

* + 1. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Tingkat keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang secara rinci tertuang dalam Visi, Misi dan Sasaran yang akan dicapai tentu memerlukan pengukuran yang realistis agar dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi tersebut.

Memperhatikan berbagai aspek tersebut diperlukan Indikator Kinerja Utama Dinas.Indikator kinerja utama adalah penjabaran dari indikator sasaran strategis. Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat dengan indikator Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang Target 55,83% dijabarkan menjadi Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Target 61,40%, Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang Target 50,25%.

Adapun Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat dengan indikator Tertib Administrasi Pertanahan Target 92,41% dijabarkan menjadi Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot Target 66% x 91,80% dan indikator Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Pertanahan Target 34% x 93,60%.

Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2018 sebagaimana tabel 5a. sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Renstra** | **Uraian Indikator** | **Target 2018** | **Bidang / Seksi Pengampu** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat | Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang | 61,40% | Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, |
|  |  | Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang | 50,25% | Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang |
| 2 | Tertib administrasi pertanahan meningkat. | Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot. | 91,80% | Bidang Pertanahan |
|  |  | Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan | 93,60% | Bidang Pertanahan |
|  |  |  |  |  |

Adapun Indikator Kinerja Utama Jangka Menegah sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tabel 5b. sebagai berikut:

**Tabel 5. b** Indikator Kinerja Utama

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Renstra** | **Uraian Indikator** |  | | **Target Kinerja** | | | | | **Sumber Data** | **Bidang / Seksi Pengampu** |
| **2017** | **2018** | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat | Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang | 52,30% | 61,40% | | 72% | 79,40% | 86,50% | 88,48% |  | Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, |
|  |  | Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang | 43,50% | 50,25% | | 56,50% | 61,75% | 68,00% | 75,45% |  | Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang |
| 2 | Tertib administrasi pertanahan meningkat. | Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot. | 29,40% | 91,80% | | 94,82% | 96,89% | 98,96% | 100,00% |  | Bidang Pertanahan |
|  |  | Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan | 31,38% | 93,60% | | 95,20% | 96,80% | 98,40% | 100,00% |  | Bidang Pertanahan |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

Program untuk mencapai Indikator Kinerja Utama adalah sebagaimana tabel 5c adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.c** Program Indikator Kinerja Utama

| **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** |
| --- | --- | --- |
| **Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat** | **Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.** | **55,83%** |
| **Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang** | **Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang** | **61,40%** |
|  | -        Pengaturan Tata Ruang |  |
| 1.     Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci |  |
| - Naskah Akademik Revisi Perda RTRW | 1 dokumen |
| - Draft Album Peta Revisi Perda RTRW | 1 dokumen |
|  | - Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)  - Draft Revisi Perda RTRW | 1 dokumen  1 dokumen |
|  | 2.      Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan |  |
| - Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL) | 2 dokumen |
| - Draft Perwal RTBL | 2 dokumen |
| - Rancangan 3 Dimensi (Skyline) Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang | 1 dokumen |
|  |  |
|  | -         Pembinaan Tata Ruang |  |
| 1.       Pembinaan Tata Ruang |  |
| - Laporan telaah penataan ruang | 1 dokumen |
| - Sosialisasi Pembinaan Tata Ruang Kota Yogyakarta. | 1 dokumen |
|  | - Studi Model dan Bentuk Kompensasi terhadap Pemanfaatan Ruang di Kota Yk. | 1 dokumen |
|  | - Kajian Evaluasi dan Identifikasi Potensi Rumah Susun di KotaYk | 1 dokumen |
|  | - Kajian Pengembangan Kawasan Tumbuh Cepat Ekonomi Jogja Barat.  - Kajian Pengembangan Kawasan Koridor Ipda Tut Harsono | 1 dokumen  1 dokumen |
|  |  |  |
| **Program Pengendalian Tata Ruang** | **Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang** | **50,25%** |
|  | -          Pengendalian Tata Ruang |  |
| 1.       Pengendalian Tata Ruang |  |
| -       Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan | 1 dokumen |
| -       Laporan Koordinasi Penyelenggaran Penataan Ruang | 1 dokumen |
|  |  |  |
|  | -          Pengawasan Tata Ruang |  |
| 1.       Pengawasan Tata Ruang |  |
| -        Laporan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanan Pengawasan Tata  Ruang (Turbinlakuwas)  -       Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penataan Ruang  -       Laporan Penerapan Standart Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang.  -       Neraca Penatagunaan Tanah | 1 dokumen  1 dokumen  1 dokumen  1 dokumen |
| -        Kajian Perangkat Pengendalian Penataan Ruang | 1 dokumen |
|  |  |
|  | -          Data dan Informasi Tata Ruang |  |
|  | 1.       Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang |  |
|  | -       Kajian Database Spasial Penataan Ruang | 1 dokumen |
|  | -        Updating Peta Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1 dokumen |
|  |  |  |
| **Tertib administrasi pertanahan meningkat.** | **Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.** | **92,41%** |
| **Program Pengelolaan Pertanahan** | **Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot.** | **91,80%** |
|  | -        Administrasi Pertanahan |  |
| 1.       Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan |  |
| - Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta | 25 bidang |
| - Pengurusan Peta Bidang Tanah | 5 bidang |
|  | - Pengurusan untuk Surat Kekancingan | 15 bidang |
|  | - Pelacakan dan Identifikasi tanah negara/pemkot sepanjang pinggiran sungai. | 3 kelurahan |
|  | * Inventarisasi Data Pertanahan se Kota Yogyakarta yang belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Pemkot. | 45 keluarahan |
|  | * Digitalisasi dokumen-dokumen vital pertanahan | 1 dokumen |
|  | * Database sistem Inventarisasi Pertanahan | 1 dokumen |
|  | 2.       Penyelesaian Masalah Pertanahan |  |
| - Penyelesaian masalah pertanahan | 1 dokumen |
| - Pencegahan timbulnya masalah pertanahan | 1 dokumen |
| **Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan** | **93,60%** |
|  | -         Administrasi Pertanahan (Pengadaan Tanah) |  |
| 1.       Pemanfaatan Pertanahan |  |
| - Pengadaan tanah pembangunan kantor kelurahan | 5 lokasi |
| - Pengadaan tanah untuk RTHP | 3 lokasi |
|  | - Pengadaan tanah untuk Balai Serbaguna | 4 lokasi |
|  | * Penyelesaian Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara | 60 permohonan |
|  |  |  |

* + 1. **Strategi**

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui beberapa strategi:

* Peningkatan pengaturan dan pembinaan tata ruang.
* Peningkatan efektifitas pelaksanaan dan pengendalian tata ruang.
* Optimalisasi pengelolaan pertanahan.
  + 1. **Sistem Pelaporan dan Koordinasi** 
       1. Bagan Sistem Pelaporan, Evaluasi, dan Konsolidasi

WALIKOTA

BIDANG PERTANAHAN

BIDANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG

BIDANG PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG

SEKRETARIAT

Subag. Keuangan dan PEP

Ka. DISPERTARU

PPTK

PENGELOLA KEGIATAN

PPTK

PENGELOLA KEGIATAN

PPTK

PENGELOLA KEGIATAN

INSTANSI TERKAIT

Keterangan:

Garis pelaporan

Garis evaluasi dan konsolidasi

* + - 1. Mekanisme Pelaporan
         1. Alur Laporan
* Dimulai dari pelaporan kegiatan dalam hal ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
* Laporan pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PPTK yang dibantu oleh Pendukung Administrasi Umum kegiatan dan Pendukung Administrasi Keuangan, dikonsolidasikan dengan Bidang sesuai tugas pokok dan fungsi melalui seksi dan subag, perkembangan kegiatan disampaikan melalui aplikasi SIM pelaporan.
* Sekretariat dalam hal ini Sub. Bag. Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan merekap dan menganalisa, melaporkan sesuai dengan mekanisme yang diberlakukan.
* Seluruh materi laporan di entrykan di SIM Dalbang oleh Petugas Urusan Pendukung Administrasi Umum
  + - * 1. Tatakala/ Waktu Pelaporan.

Awal sampai dengan akhir hari dalam bulan yang bersangkutan merupakan waktu pelaksanaan kegiatan. Maksimal tanggal 10 bulan berikutnya laporan tiap bulan dan tribulan harus sudah terkirim menggunakan aplikasi SIM Pelaporan Bagian Pengendalian Pembangunan.

* + - * 1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari para petugas urusan Administrasi Umum pada masing-masing kegiatan.

* + - * 1. Evaluasi dan Konsolidasi
* Evaluasi dan konsolidasi dilaksanakan baik lintas PPTK, lintas seksi/Sub Bagian dan lintas bidang secara vertical (baik *top down* maupun *bottom up*) dan secara horizontal maupun diagonal tergantung aspek/materi pembahasan.
* Waktu pelaksanaan evaluasi dan konsolidasi dilakukan dengan rentang waktu bulanan serta insindental tergantung urgensi kasus, bahasan, atau materi.
  + - 1. SistemPedoman Pengumpulan Data Kinerja
  1. Bagan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja

WALIKOTA

BIDANG PERTANAHAN

BIDANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG

BIDANG PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG

SEKRETARIAT

Subag. Keuangan dan PEP

* LKIP
* LKPJ

Ka. DISPERTARU

* Ass. Kesra
* Inspektorat
* Bag. Organisasi

PPTK/PPKom

PPTK/PPKom

PPTK/PPKom

Keterangan:

Alur Pengumpulan data

* 1. Prosedur pengumpulan data kinerja
     1. PPTK membuat dan melaporkan progres kegiatan kepada Kepala DISPERTARU dengan persetujuan Kepala Bidang, Sekretariat sesuai Tugas Pokok dan Fungsi.
     2. Laporan dihimpun secara elektronik dalam bentuk SIM Dalbang oleh masing-masing PPTK utuk data kinerja dan dihimpun secara elektronik dalam bentuk SIPKD untuk data kinerja keuangan
     3. Sekretariat (Sub Bag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) merekap, memproses, mengolah laporan-laporan sebagai bahan dalam penyusunan LKIP.
     4. Draft penyusunan LKIP dibahas dalam rapat koordinasi lintas Bidang dan Sekretariat.
     5. LKIP Dinas disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Bagian Organisasi dan Inspektorat.
  2. **Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018**

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta telah menetapkan PK sebagai berikut :

**Tabel 6**. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Kinerja penyelenggaraan pemanfaatan ruang meningkat. | Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang. | 55,83 |
| 2 | Tertib administrasi pertanahan meningkat. | Indeks tertib administrasi pertanahan | 92,41 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **Anggaran** | **Keterangan** |
| 1. | Program Pembinaan Tata Ruang | Rp. 1.873.567.890,- | Perubahan APBD |
| 2. | Program Pengendalian Tata Ruang | Rp. 1.000.042.040,- | Perubahan APBD |
| 3. | Program Pengelolaan Pertanahan | Rp.103.916.756.090,- | Perubahan APBD |

Untuk indikator Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, akan dicapai dengan program/kegiatan :

**Tabel 7**. Program/Kegiatan untuk mendukung Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program / Kegiatan** |  | **Indikator Kinerja Outcomes (Hasil)** |
|  |  |  |  |
| **I** | **Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang** |  |  |
| 1 | Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci | - | Tersedianya Draft Revisi PerdaRencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. |
| 2 | Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan | - | Meningkatnya Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Perkotaan. |
| 3 | Pembinaan Tata Ruang | - | Meningkatnya sinergitas dan keselarasan Pembangunan Kota Yogyakarta dengan tata ruang kota maupun tata ruang keistimewaan. |
|  |  |  |  |

Untuk indikator Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang, akan dicapai dengan program/kegiatan :

**Tabel 8**. Program/Kegiatan untuk mendukung Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program / Kegiatan** |  | **Indikator Kinerja Outcomes (Hasil)** |
|  |  |  |  |
| **I** | **Program Pengendalian Tata Ruang** |  |  |
| 1 | Pengendalian Tata Ruang | - | Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah. |
| 2 | Pengawasan Tata Ruang | - | Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang yang tertib dan berkelanjutan. |
| 3 | Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang | - | Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi tata ruang dan pertanahan Kota Yogyakarta |
|  |  |  |  |

Untuk indikator Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot, akan dicapai dengan program/kegiatan :

**Tabel 9**. Program/Kegiatan untuk mendukung Tertib administrasi pertanahan meningkat.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program / Kegiatan** |  | **Indikator Kinerja Outcomes (Hasil)** |
|  |  |  |  |
| **I** | **Program Pengelolaan Pertanahan** |  |  |
| 1 | Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan | -  -  -  -  -  -  - | Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta.  Persentase pengurusan peta bidang tanah untuk Fasum jalan kampung di wilayah Kota Yk.  Pengurusan Surat Kekancingan yang digunakan oleh Pemkot Yogyakarta  Teridentifikasi dan terverifikasi tanah negara/pemkot yang berada di sepanjang sungai.  Validitas data pertanahan se Kota Yogyakarta yang belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yk.  Terdokumentasi secara digital dokumen-dokumen pertanahan.  Tersedia data inventarisasi pertanahan sebagai database Sistem Informasi Pertanahan. |
| 2 | Penyelesaian Masalah Pertanahan | - | Kejelasan status pertanahan |
|  |  |  |  |

Sedangkan untuk mencapai Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan dilaksanakan program/kegiatan :

**Tabel 10.** Program/Kegiatan untuk mendukung Tertib administrasi pertanahan meningkat.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program / Kegiatan** |  | **Indikator Kinerja Outcomes (Hasil)** |
|  |  |  |  |
| **I** | **Program Pengelolaan Pertanahan** |  |  |
| 1 | Pemanfaatan Pertanahan | - | Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta |
|  |  | - | Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan. |
|  |  |  |  |

* 1. **Anggaran Tahun 2018**

Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2018 sebesar Rp 110.113.535.892,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 11.** Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Anggaran** | **%** |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 2.138.065.122,- | 1,94 |
| 2 | Belanja Langsung | 107.975.470.770,- | 98,06 |
| **Jumlah** | | **110.113.535.892,-** | **100,00** |

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang digunakan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 12**. Rincian anggaran pendukung untuk sasaran strategis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Strategis/Program/Kegiatan** | **Anggaran** | **Sumber Dana** |
| **I** | **Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat** |  |  |
| **A** | **Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang** | **1.873.567.890** |  |
| 1 | Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci | 692.615.390 | APBD |
| 2 | Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan | 736.108.250 | APBD |
| 3 | Pembinaan Tata Ruang | 444.844.250 | APBD |
| **B** | **Program Pengendalian Tata Ruang** | **1.000.042.040** |  |
| 1 | Pengendalian Tata Ruang | 196.311.600 | APBD |
| 2 | Pengawasan Tata Ruang | 474.518.190 | APBD |
| 3 | Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang | 329.212.250 | APBD |
| **II** | **Tertib administrasi pertanahan meningkat.** |  |  |
| **A** | **Program Pengelolaan Pertanahan** | **103.916.756.090** |  |
| 1 | Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan | 388.063.500 | APBD |
| 2 | Pemanfaatan Pertanahan | 103.485.892.650 | APBD |
| 3 | Penyelesaian Masalah Pertanahan | 42.799.940 | APBD |
|  |  |  |  |

Adapun anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program internal dinas adalah sebagai berikut:

**Tabel 13.** Rincian anggaran program/kegiatan internal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Strategis/Program/Kegiatan** | **Anggaran** | **Sumber Dana** |
|  |  |  |  |
| **A** | **Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **750.795.250** |  |
| 1 | Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 185.911.000 | APBD |
| 2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor | 484.201.990 | APBD |
| 3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 80.682.260 | APBD |
|  |  |  |  |
| **B** | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **373.931.000** |  |
| 1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | 244.585.000 | APBD |
| 2 | Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 129.346.000 | APBD |
|  |  |  |  |
| **C** | **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **60.378.500** |  |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD | 60.378.500 | APBD |
|  |  |  |  |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

* 1. **Capaian Kinerja Organisasi**

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam LKIP tahun 2018 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Sedangkan penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijakan, program dan kegiatan yang sesungguhnya dalam periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.

Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator kegiatan. Pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2018 merupakan kemampuan dalam perencanaan dan hasil penyelenggaraan penataan ruang serta pelaksanaan pengelolaan pertanahan.

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2018, Rencana Kinerja (Renja) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta 2017 - 2022.

* + 1. **Sasaran 1: Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat**

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan program/kegiatan :

**Tabel 14**. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

| **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **REALISASI** | **PERSENTASE** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat** | **Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.** | **55,83%** | **55,83%** | **100%** |
| **Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang** | **Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang** | **61,40%** | **61,40%** | **100%** |
|  | -        Pengaturan Tata Ruang |  |  |  |
| 1.       Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci |  |  | 100% |
| - Naskah Akademik Revisi Perda RTRW | 1 dokumen | 1 dokumen |  |
| * Draft Album Peta Rivisi Perda RTRW | 1 dokumen | 1 dokumen |  |
| - Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | 1 dokumen | 1 dokumen |  |
|  | * Draft Revisi Perda RTRW | 1 dokumen | 1 dokumen |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 2.       Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan |  |  | 100% |
| - - Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL) | 2 dokumen | 2 dokumen |  |
| - Draft Perwal RTBL | 2 dokumen | 2 dokumen |  |
| - Rancangan 3 Dimensi (Skyline) Pengaturan Intensitas  Pemanfaatan Ruang. | 1 dokumen | 1 dokumen |  |
|  |  |  |  |
|  | -        Pembinaan Tata Ruang |  |  |  |
| 1.       Pembinaan Tata Ruang |  |  | 100% |
| - Laporan telaah penataan ruang | 1 dokumen | 1 dokumen |  |
| - Sosialisasi Pembinaan Tata Ruang Kota Yogyakarta. | 1 dokumen | 1 dokumen |  |
|  | * Studi model dan bentuk kompensasi terhadap pemanfaatan ruang di Kota Yk. | 1 dokumen | 1 dokumen |  |
|  | * Kajian evaluasi dan identifikasi potensi rumah susun di Kota Yk. | 1 dokumen | 1 dokumen |  |
|  | * Kajian Pengembangan Kawasan Tumbuh Cepat Ekonomi Jogja Barat. | 1 dokumen | 1 dokumen |  |
|  | * Kajian Pengembangan Kawasan Koridor Ipda Tut Harsono. | 1 dokumen | 1 dokumen |  |
|  |  |  |  |  |
| **Program Pengendalian Tata Ruang** | **Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang** | **50,25%** | **50,25%** | **100%** |
|  | -          Pengendalian Tata Ruang |  |  |  |
| 1.       Pengendalian Tata Ruang |  |  | 100% |
| -       Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan | 1 dokumen | 1 dokumen |  |
| -       Laporan Koordinasi Penyelenggaran Penataan Ruang | 1 dokumen | 1 dokumen |  |
|  | -          Pengawasan Tata Ruang |  |  | 100% |
| 1.       Pengawasan Tata Ruang |  |  |
| -        Laporan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanan  Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakwas) | 1 dokumen | 1 dokumen |
| -        Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penataan  Ruang. | 1 dokumen | 1 dokumen |
| -        Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Krite-  ria (NSPK) Penataan Ruang. | 1 dokumen | 1 dokumen |
| * Neraca Penatagunaan Tanah | 1 dokumen | 1 dokumen |
| * Kajian Perangkat Pengedalian Penataan Ruang. | 1 dokumen | 1 dokumen |
|  | -          Data dan Informasi Tata Ruang |  |  |  |
|  | 1.       Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang |  |  | 100% |
|  | -       Kajian Database Spasial Penataan Ruang  - Updating Peta Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1 dokumen  1 dokumen | 1 dokumen  1 dokumen |  |
|  |  |  |  |  |

* Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| K1 = | ∑ persentase realisasi target kinerja | x target kinerja |
|  |
| 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (100%+100%+100%) |  |
| K1 = |  | x 61,40 % = 61,40 % |
|  | 3 |  |

* Program Pengendalian Tata Ruang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| K2 = | ∑ persentase realisasi target kinerja | x target kinerja |
|  |
| 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (100%+100%+100%) |  |
| K2 = |  | x 50,25 % = 50,25 % |
|  | 3 |  |

Capaian indikator sasaran Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| K = | K1 + K2 |  |
|  |
| 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| K = | 61,40 + 50,25 | = 55,83 % |
|  |
| 2 |

**Tabel 15**. Target dan realisasi kinerja indikator sasaran

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Capaian 2017** | **2018** | | | **Target Akhir Renstra (2022)** | **Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%)** |
| **Target** | **Realisasi** | **% Realisasi** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang. | 47,90 | 55,83% | 55,83% | 100% | 81,97 | 68,11% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

* + - 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018;

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi sebagai berikut :

* 1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi

Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

Evaluasi kinerja dilakukan dengan menggunakan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan, Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja APBD level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

* 1. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2018 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

1. Pengukuran kinerja yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran kinerja.
2. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan APBD data hasil Pengukuran kinerja dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

Target kinerja pada tahun 2018 sebesar 55,83% dan terealisasi sebesar 55,83%. Dengan demikian, pencapaian target kinerja dapat terpenuhi 100%.

* + - 1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tahun 2018 merupakan tahun kedua masa Renstra 2017 – 2022 dimana kinerjanya dapat mencapai 100%.

**Tabel 16.** Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang. | 47,90% | 47,90% | 55,83% | 55,83% | 64,25% | 0,00% | 70,58% | 0,00% | 77,25% | 0,00% | 81,87% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Grafik 1.** Target dan realisasi sasaran terlaksananya kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat

**Prosentase**

**Tahun**

* + - 1. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah Renstra;

Capaian kinerja pada tahun 2018 yang merupakan tahun kedua Renstra 2017 – 2022 ditargetkan sebesar 55,83%. Target kinerja tersebut dapat tercapai 100% sehingga persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra sudah terpenuhi 68,11%.

* + - 1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup.

* + - 1. Analisis efisiensi sumber daya dengan cara sebagai berikut ;

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta memiliki jumlah pegawai masih kurang dari kebutuhan. Namun demikian seluruh program dan kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun sebagian pegawai harus mengampu beberapa pekerjaan.

Dalam hal pendanaan, serapan anggaran lebih kecil dari yang dianggarkan karena adanya efisiensi.

* + - 1. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat yaitu:

* + 1. Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang yang meliputi kegiatan:
* Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci
* Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan
* Pembinaan Tata Ruang

Indikator Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dapat tercapai 100%

* + 1. Program Pengendalian Tata Ruang yang meliputi kegiatan:
* Pengendalian Tata Ruang
* Pengawasan Tata Ruang
* Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang

Indikator Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang dapat tercapai 100%

* + 1. **Sasaran 2: Tertib administrasi pertanahan meningkat.**

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan program/kegiatan :

**Tabel 17**. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **REALISASI** | **PERSENTASE** |
| **Tertib administrasi pertanahan meningkat.** | **Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.** | **92,41%** | **92,41%** | **100%** |
| **Program Pengelolaan Pertanahan** | **Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot.** | **91,80 %** | **91,80 %** | **100%** |
|  | -        Administrasi Pertanahan |  |  |  |
| 1.       Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan |  |  | 100% |
| - Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta | 25 bidang | 27 bidang |  |
| - Pengurusan Peta Bidang Tanah  - Pengurusan untuk Surat kekancingan | 5 bidang  15 bidang | 3 bidang  15 bidang |  |
|  | - Pelacakan dan identifikasi tanah Negara/Pemkot  Sepanjang pinggiran sungai. | 3 kelurahan | 3 kelurahan |  |
|  | - Inventarisasi Data Pertanahan se Kota Yogyakarta yang  belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Kadipaten  dan tanah Pemkot. | 9 kelurahan | 9 kelurahan |  |
|  | * Digitalisasi dokumen-dokumen vital pertanahan. | 1 dokumen | 1 dokumen |  |
|  | * Database Sistem Inventarisasi Pertanahan | 1 dokumen | 1 dokumen |  |
|  | 2.       Penyelesaian Masalah Pertanahan |  |  | 100% |
| - Penyelesaian masalah pertanahan | 1 dokumen | 1 dokumen |  |
| - Pencegahan timbulnya masalah pertanahan | 1 dokumen | 1 dokumen |  |
|  |  |  |  |
| **Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan** | **93,60%** | **93,60%** | **100%** |
|  | -         Administrasi Pertanahan (Pengadaan Tanah) |  |  |  |
| 1.       Pemanfaatan Pertanahan |  |  | 100% |
| - Pengadaan tanah pembangunan kantor kelurahan | 11 lokasi | 11 lokasi |  |
| - Pengadaan tanah untuk RTHP | 9 lokasi | 7 lokasi |  |
|  | - Pengadaan tanah untuk Balai Serbaguna | 6 lokasi | 5 lokasi |  |
|  |  |  |  |  |

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan program Pengelolaan Pertanahan yang meliputi dua indikator kinerja program yaitu:

* + 1. Indikator **Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot**, didukung oleh dua kegiatan:
* Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Pertanahan
* Kegiatan Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

Penghitungan capaian kinerja Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot Tahun 2018 diukur atas dasar diperolehnya :

* Bukti Pembayaran (BP) pendaftaran pensertifikatan ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
* Terwujudnya digitalisasi dokumen vital pertanahan.
* Tersedianya sistem informasi data pertanahan

Sebagai output target Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta pada kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan.

Jika dokumen diatas terpenuhi maka capaian kinerja 100%.

* + 1. Indikator **Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Pertanahan,** didukung oleh kegiatan Pemanfaatan Pertanahan.

Penghitungan capaian kinerja Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan Mengacu kepada terpenuhinya tahapan proses pengadaan tanah yang meliputi tahap persiapan, perencanaan, proses appraisal sampai dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan atau pembayaran.

kinerja diperhitungkan tercapai 100% apabila telah sampai proses pelaksanaan musyawarah berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam :

SK Tim Pelaksana Kegiatan

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Dokumen Appraisal

Berita Acara Proses Musyawarah.

Perhitungan capaian sasaran kinerja Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat menggunakan rumusan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| K = | (persentase realisasi pensertifikatan tanah aset pemkot x 66%)1) + (persentase realisasi tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah x 34%)2) |
|  |
| 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| K = | (91,80% x 66%) + (93,60% x 34%) | = 92,41 % |
|  |
| 2 |

* 1. Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot diperoleh dari persentase capaian realisasi terhadap target pada output Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta pada kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan
  2. Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan diperoleh dari persentase realisasi proses administrasi pengadaan tanah yang meliputi persiapan, perencanaan, appraisal, dan musyawarah pada kegiatan Pemanfaatan Pertanahan.

**Tabel 18.** Target dan realisasi Kinerja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Capaian 2017** | **2017** | | | **Target Akhir Renstra (2022)** | **Capaian s/d 2017 terhadap 2022 (%)** |
| **Target** | **Realisasi** | **% Realisasi** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan. | 30,07 | 92,41% | 92,41% | 100% | 100 | 92,41% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

* + - 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018;

Target kinerja pada tahun 2018 sebesar 92,41%, dan terealisasi sebesar 92,41% Dengan demikian, pencapaian target kinerja dapat terpenuhi 100%.

* + - 1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tahun 2018 merupakan tahun kedua masa Renstra 2017 – 2022 dimana kinerjanya dapat mencapai 100%.

**Tabel 19. Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tertib administrasi pertanahan meningkat. | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan. | 30,07% | 30,07% | 92,41% | 92,41% | 94,95% | 0,00% | 96,86% | 0,00% | 98,77% | 0,00% | 100% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grafik 1. Target dan realisasi sasaran terlaksananya Tertib administrasi pertanahan meningkat.

**Prosentasee**

**Tahun**

* + - 1. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah Renstra;

Capaian kinerja pada tahun 2018 yang merupakan tahun pertama Renstra 2017 – 2022 ditargetkan sebesar 92,41%. Target kinerja tersebut dapat tercapai 100% sehingga persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra sudah terpenuhi 92,41%.

* + - 1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompetain, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup.

* + - 1. Analisis efisiensi sumber daya dengan cara sebagai berikut ;

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta memiliki jumlah pegawai yang terbatas dan terdapat kekosongan pegawai pada beberapa jabatan teknis. Namun seluruh program dan kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun sebagian pegawai harus mengampu beberapa pekerjaan.

Dalam hal pendanaan, serapan anggaran lebih kecil dari yang dianggarkan karena adanya efisiensi.

* + - 1. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Program Pengelolaan Pertanahan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat meliputi kegiatan:

1. Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan
2. Penyelesaian Masalah Pertanahan

Mendukung pencapaian indikator Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot 100%. Yang dihitung dari output Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap target pada Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan.

1. Pemanfaatan Pertanahan

Mendukung pencapaian indikator Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan 100%.

* + 1. **Capaian Kinerja Internal**

Untuk Pengukuran kinerja internal teralokasikan dalam 3 program kegiatan internal yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan di Sekretariat dengan anggaran belanja pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp 750.795.250,00, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur dengan anggaran Rp 373.931.000,00. dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp 60.378.500,00. Program-program tersebut semua dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan kebutuhan dengan realisasi fisik mencapai 99,82 %.

* 1. **Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 73,95 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran pada sasaran kinerja Penyelenggaraan penataan ruang meningkat mencapai 98,27%. Sedangkan penyerapan anggaran pada sasaran Tertib administrasi pertanahan meningkat sebesar 72,55%.

Penyerapan anggaran yang belum optimal pada sasaran Tertib administrasi pertanahan meningkat disebabkan tidak tercapainya mufakat terkait harga tanah dengan pemilik tanah pada pekerjaan :

* Pengadaan tanah untuk RTHP Kelurahan Tegalrejo
* Pengadaan tanah untuk RTHP Kelurahan Cokrodiningratan
* Pengadaan tanah untuk Gedung Serbaguna Kelurahan Bumijo

Namun demikian keseluruhan proses/mekanisme pengadaan tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku telah dilaksanakan sehingga sasaran kinerja strategis tetap tercapai 100%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 20.** Realisasi Kinerja dan Anggaran

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Kinerja | | | Nama Program | Keuangan | | |
| Target | Realisasi | % Realisasi | Pagu | Realisasi | % Realisasi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang. | 55,83% | 55,83% | 100,00% | Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang | 1.873.567.890,00 | 1.732.575.425,00 | 97,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pengendalian Tata Ruang | 1.000..42.040,00 | 991.602.400,00 | 99,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tertib administrasi pertanahan meningkat. | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan. | 92,41% | 92,41% | 100% | Pengelolaan Pertanahan | 103.916.756.090,00 | 75.392.779.165,00 | 72,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pada sasaran kinerja Penyelenggaraan penataan ruang meningkat yang didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dan Program Pengendalian Tata Ruang, seluruh kegiatan dan pekerjaan pada kedua program tersebut dapat terlaksana sepenuhnya 100% dengan memanfaatkan anggaran sebesar 98,27% karena adanya efisiensi anggaran.

Pada sasaran Tertib administrasi pertanahan meningkat yang didukung oleh program Pengelolaan Pertanahan, realisasi anggaran mencapai 72,55%. Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan tidak tercapainya kesepakatan harga tanah dengan pemilik tanah pada pekerjaan pengadaan tanah untuk RTHP Kelurahan Tegalrejo, RTHP Kelurahan Cokrodiningratan dan Pengadaan tanah untuk gedung serbaguna Kelurahan Bumijo. Pemilik tanah meminta harga yang lebih tinggi dari harga tanah hasil *appraisal* sehingga sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku proses pengadaan tanah tidak dapat dilanjutkan.

Dari evaluasi realisasi tiap triwulan, antara target dengan realisasi pada tribulan pertama masih terjadi deviasi yang cukup jauh, namun pada triwulan kedua hingga tribulan keempat realisasi rerata dapat mencapai lebih dari 70%.

Pada Program-program yang mengampu sasaran kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat, deviasi terjadi terutama disebabkan oleh proses administrasi pencairan termijn yang cukup lama sehingga berimbas pada penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan. Sedangkan pada program yang mengampu sasaran Tertib administrasi pertanahan meningkat, deviasi yang besar terjadi ketika terjadi kegagalan pengadaan tanah dikarenakan tidak adanya kesepakatan harga tanah dengan pemilik tanah.

Perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ke depan perlu ditingkatkan lagi agar realisasi keuangan bisa disesuaikan dengan ploting target anggaran pada tiap tribulannya. Perencanaan pencapaian target/output kegiatan/pekerjaan dan perencanaan ploting anggarannya yang sesuai dapat mengurangi potensi deviasi yang cukup besar. Namun demikian, untuk pekerjaan pengadaan tanah, potensi deviasi yang besar kemungkinannya akan selalu ada mengingat harga tanah hasil appraisal dan permintaan harga tanah dari pemilik tanah bisa sangat berbeda.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **KEGIATAN** | **Triwulan I** | | | **Triwulan II** | | | **Triwulan III** | | | **Triwulan IV** | | |
| **Target** | **Realisasi** | **%** | **Target** | **Realisasi** | **%** | **Target** | **Realisasi** | **%** | **Target** | **Realisasi** | **%** |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 125.180.915,00 | 109.226.561,00 | 87,25 | 493.650.630,00 | 211.976.153,00 | 42,94 | 616.871.545,00 | 543.903.092,00 | 88,17 | 750.795.250,00 | 741.658.507,00 | 98,78 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Aparatur | 50.027.500,00 | 13.136.875,00 | 26,26 | 292.965.000,00 | 42.376.075,00 | 14,46 | 327.752.400,00 | 269.244.075,00 | 82,15 | 373.931.000,00 | 327.617.775,00 | 87,61 |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 8.747.000,00 | 4.308.300,00 | 49,25 | 27.707.500,00 | 16.295.200,00 | 58,81 | 40.548.000,00 | 34.377.300,00 | 84,78 | 60.378.500,00 | 59.762.100,00 | 98,98 |
| 4 | Program Pengelolaan Barang Daerah | 34.030.400,00 | 18.816.525,00 | 55,29 | 356.395.050,00 | 99.611.850,00 | 27,95 | 1.045.238.200,00 | 678.106.500,00 | 64,88 | 1.873.567.890,00 | 1.832.575.425,00 | 97,81 |
| 5 | Program Peningkatan Barang Daerah | 16.765.900,00 | 10.754.800,00 | 64,15 | 121.205.600,00 | 32.320.300,00 | 26,67 | 653.246.900,00 | 67.400.700,00 | 10,32 | 1.000.042.040,00 | 991.602.400,00 | 99,16 |
| 6 | Program Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah | 443.989.975,00 | 390.762.360,00 | 88,01 | 16.379.193.700,00 | 2.773.049.110,00 | 16,93 | 16.591.859.925,00 | 10.935.325.005,00 | 65,91 | 103.916.756.090,00 | 75.392.779.165,00 | 72,55 |
|  | Jumlah | 678.741.690,00 | 547.005.421,00 | 80,59 | 17.671.117.480,00 | 3.175.628.688,00 | 17,97 | 19.275.516.970,00 | 12.528.356.672,00 | 65,00 | 107.975.470.770,00 | 79.345.995.372,00 | 73,49 |

**Tabel 21.** Realisasi Keuangan per Triwulan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Gambar 1. Grafik Realisasi Keuangan Per Triwulan

Anggaran

Triwulan

**BAB IV**

**PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKJ) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKJ menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKJ akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2018), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada tahun 2018 adalah sangat baik dengan capaian kinerja sasaran mencapai 100%.

**Tabel 22**. Realisasi pencapaian sasaran strategis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Persentase Realisasi |
|
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang. | 55,83% | 55,83% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tertib administrasi pertanahan meningkat. | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan. | 92,41% | 92,41% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |

Sedangkan untuk dukungan anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 110.113.535.892,00. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 81.425.314.633,00 (73,95%). Tidak optimalnya penyerapan anggaran merupakan imbas dari tidak dapat tercapainya kesepakatan harga tanah dengan pemilik tanah. Rincian realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 23**. Realisasi Anggaran

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program/kegiatan** | **Anggaran** | **Realisasi** | |
| **Rp.** | **Rp** | **%** |
| **A** | **Belanja Daerah** | **110.113.535.892,00** | **91.425.314.633,00** | **73,95** |
| **B** | **Belanja Tidak Langsung** | **2.138.065.122,00** | **2.079.319.261,00** | **97,25** |
| **C** | **Belanja Langsung** | **107.975.470.770,00** | **79.345.995.372,00** | **73,49** |
| 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 750.795.250,00 | 741.658.507,00 | 98,78 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Aparatur | 373.931.000,00 | 327.617.775,00 | 87,61 |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 60.378.500,00 | 59.762.100,00 | 98,98 |
| 4 | Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang | 1.873.567.890,00 | 1.832.575.425,00 | 97,81 |
| 5 | Program Pengendalian Tata Ruang | 1.000.042.040,00 | 991.602.400,00 | 99,16 |
| 6 | Program Pengelolaan Pertanahan | 103.916.756.090,00 | 75.392.779.165,00 | 72,55 |

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang di Tahun Anggaran 2018 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. **Keberhasilan :**

Capaian sasaran strategis dapat tercapai 100% didukung oleh:

1. Terciptanya etos kerja dan komitmen dari pegawai
2. Adanya koordinasi internal dinas yang cukup sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
3. **Hambatan:**

Dalam pelaksanaan program/kegiatan ditemui beberapa hambatan antara lain:

1. Kuantitas SDM yang belum memadai.
2. Kesamaan pemahaman terhadap aturan-aturan yang ternyata belum begitu sejalan dengan Perangkat Daerah terkait.
3. Lama waktu proses pensertifikatan tanah dalam hal pensertifikatan aset Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berkaitan dengan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Yk tidak bisa diprediksi.
4. Lama waktu proses kekancingan tanah dalam hal pengurusan Surat Kekancingan atas aset yang digunakan oleh Pemkot berkaitan dengan KHP Wahono Sarto Kriyo tidak bisa diprediksi.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perubahan peta bidang untuk fasilitas umum yang menyatu dengan tanah persil masyarakat.
6. Transaksi pembelian/pengadaan tanah sebagian gagal yang disebabkan oleh berbagai faktor diluar kendali kedinasan.
7. **Antisipasi:**
8. Penambahan kuantitas SDM sesuai dengan analisa jabatan yang ada
9. Peningkatan kualitas SDM
10. Pengusulan kebutuhan dalam kegiatan berdasarkan tatakala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Pengayaan informasi dan peningkatan terhadap pemahaman aturan-aturan yang digunakan dari seluruh Perangkat Daerah terkait.
12. Merevisi rumusan output kegiatan untuk disesuiakan dengan kendali kewenangan Dinas menjadi “Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah didaftarkan ke BPN”.
13. Mengintensifkan koordinasi untuk percepatan proses kekancingan.
14. Mengintensfikan diseminasi ke masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang proses perubahan peta bidang untuk fasilitas umum yang menyatu dengan persil tanah masyarakat.
15. Pemilik tanah melaksanakan proses turun waris sertifikat sebelum proses pengadaan tanah dilaksanakan.
16. Mempersyaratkan adanya dokumen perikatan antara inisiator selaku calon pengguna dengan pemilik tanah dalam verifikasi proposal permohonan pengadaan tanah.
17. Memaksimalkan harga negosiasi sesuai harga maksimal appraisal.
18. **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.**

Rekomendasi evaluasi tahun lalu :

* + - 1. Melaksanakan reviu terhadap Renstra sehingga meningkatkan kualitas Renstra.
      2. Memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment.*
      3. Membuat Laporan Kinerja yang menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai dengan menambahkan pembandingan dengan standar nasional/ RPJMN.
      4. Informasi kinerja agar dimanfaatkan secara optimal untuk penilaian kinerja.
      5. Melaksanakan pemantauan atas capaian Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja yang hasilnya memberikan penilaian dan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
      6. Melaksanakan evaluasi atas Rencana Aksi yang hasilnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Tindak lanjut atas rekomendasi :

Melaksanakan reviu Renstra sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap capaian target sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022.

Memberikan reward kepada para PPTK dan Pejabat Pembuat Komitmen atas kinerja yang telah dicapai berupa sertifikat penghargaan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Menyusun Laporan Pelaksanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Tata Ruang.

Memanfaatkan informasi kinerja yang ada untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penilaian kinerja.

Memantau Rencana Aksi dengan menggunakan fitur aplikasi yang tersedia dalam SIM Pelaporan dengan bentuk standar yang menyajikan program, kegiatan, keluaran dan tolok ukur.

Melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja setiap akhir bulan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja.

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Tahun Anggaran 2018. Untuk tahun-tahun mendatang kiranya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) selalu mohon dukungan semua pihak dalam mewujudkan Visi, Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Januari 2019

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

Ttd.

Ir. Hari Setyowacono, MT.

NIP. 19640126 199303 1 005